

ABSTRAK

Sinta Nofitasari 126103212122, Peran Imigrasi Dalam Sistem Cegah Dan Tangkal Pelaku Tindak Pidana Korupsi Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar), Universitas Islam Negeri Ali Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dengan dosen pembimbing : Ladin, S.H.I. M.H.

Kata Kunci : Pencegahan dan penangkalan, Tindak pidana Korupsi, Fiqih Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pelaku tindak pidana korupsi di Kota Blitar, di mana setiap pelaku yang telah dinyatakan terlibat dalam tindak pidana korupsi sering kali berupaya melarikan diri, baik ke luar daerah maupun ke luar negeri guna menghindari proses hukum. Untuk itu, diperlukan suatu langkah pencegahan dan penangkalan agar pelaku tidak dapat melarikan diri dari proses hukum yang sedang berjalan. Salah satu instansi yang memiliki peran dalam hal ini adalah Kantor Imigrasi Kota Blitar. Kantor Imigrasi memegang peran penting dalam mencegah pelaku korupsi melarikan diri, dengan sistem Cegah dan Tangkal, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Kantor Imigrasi Kota Blitar dalam pencegahan dan penangkalan tindak pidana korupsi melalui sistem Cegah dan Tangkal.

Rumusan Masalah yang diangkat dalam penelitian ini yaitu : 1) bagaimana sistem cegah dan tangkal yang dilakukan oleh imigrasi kota blitar. 2) bagaimana upaya imigrasi kota blitar dalam menerapkan sistem cegah dan tangkal bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut undang-undang nomor 6 tahun 2011. 3) bagaimana upaya imigrasi kota blitar dalam menerapkan sistem cegah dan tangkal bagi pelaku tindak pidana korupsi prespektif fiqih siyasah dusturiya.

Metode yang dilakukan oleh penelitian ini adalah penelitian Yuridis Empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi di Kantor Imigrasi Kota Blitar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Sistem Pencegahan adalah larangan bagi seseorang untuk keluar dari Wilayah Indonesia. Sementara Penangkalan adalah larangan bagi Warga Negara Asing untuk memasuki Indonesia. pelaksanaan pencegahan di imigrasi kota blitar dimulai dengan permintaan dari instansi, kemudian instansi terkait membuat surat yang memuat identitas dan alasan pencegahan untuk di kirimkan ke imigrasi kota blitar. Pihak Imigrasi kemudian mengevaluasi kelayakan kasus untuk dimasukkan dalam daftar cekal, melakukan verifikasi, dan akhirnya menambahkan data tersebut ke dalam sistem Imigrasi dan cekal. Sedangkan untuk penangkalan, prosesnya melibatkan koordinasi dengan kepolisian, termasuk penggunaan aplikasi Interpol untuk melacak pelaku tindak pidana. Selanjutnya, penerbitan Red Notice dilaksanakan untuk memberi tahu negara-negara anggota Interpol tentang orang yang dicari. Sistem ini didukung oleh teknologi biometrik canggih di bandara, seperti pemindaian wajah, sidik jari, dan iris mata, yang memungkinkan deteksi otomatis saat pelaku mencoba memasuki Indonesia. 2) Upaya Imigrasi Kota Blitar dalam Menerapkan Sistem Cegah dan Tangkal Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimulai dengan permintaan dari pejabat berwenang, diikuti dengan pembuatan keputusan tertulis yang memuat identitas lengkap, foto, serta alasan pencegahan atau penangkalan. Setelah itu, verifikasi dilakukan oleh

Menteri Keimigrasian, dengan kemungkinan penolakan atau penerimaan, dan data dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Proses pencegahan kemudian dilaksanakan oleh pejabat imigrasi, dengan pemberlakuan masa pencegahan selama 6 bulan yang dapat diperpanjang untuk 6 bulan berikutnya. Jika perpanjangan dua kali habis tanpa ada pembaruan, maka pencegahan atau penangkalan dianggap selesai. Sistem cegah dan tangkal yang diterapkan bersifat pasif, artinya tidak bisa dilakukan tanpa adanya permintaan dari pejabat berwenang sesuai ketentuan undang-undang. sistem ini sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas keadilan. 3) Upaya Imigrasi Kota Blitar dalam menerapkan sistem cegah dan tangkal tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Dusturiyah yaitu berpegang pada prinsip keadilan, Imigrasi memastikan setiap tindakan dan kebijakan yang diambil tidak diskriminatif dan berdasarkan hukum yang adil. Prinsip kepercayaan. Prinsip Musyawarah. Prinsip kemaslahatan umum. Dengan penerapan prinsip-prinsip ini, Imigrasi Kota Blitar tidak hanya berfungsi dalam pengawasan pergerakan orang, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga integritas pemerintah dan menegakkan keadilan sosial yang melindungi kepentingan umum.

ABSTRACT

Sinta Nofitasari 126103212122, The Role of Immigration in the Prevent and Deter System for Perpetrators of Corruption Crimes Perspective of Law Number 6 of 2011 (Case Study of Class II Non TPI Blitar Immigration Office), Ali Sayyid Ali Rahmatullah State Islamic University Tulungagung. With supervisor: Ladin, S.H.I. M.H.

Keywords : Prevention and deterrence, Corruption Crimes, Fiqih Siyasah Dusturiyah.

This research is motivated by perpetrators of criminal acts of corruption in Blitar City, where every perpetrator who has been declared involved in a criminal act of corruption often tries to flee, either outside the region or abroad in order to avoid the legal process. For this reason, preventive and deterrent steps are needed so that perpetrators cannot escape from the ongoing legal process. One of the agencies that has a role in this is the Blitar City Immigration Office. The Immigration Office plays an important role in preventing corruption perpetrators from escaping, with the Prevent and Deter system, which is regulated in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. This research aims to analyze the role of the Blitar City Immigration Office in preventing criminal acts of corruption through the Prevent and Deter system.

The formulation of the problem raised in this research is: 1) what is the prevention and deterrence system implemented by immigration in the city of Blitar. 2) What are Blitar City's immigration efforts in implementing a prevent and deter system for perpetrators of criminal acts of corruption according to Law Number 6 of 2011. 3) What are Blitar City's immigration efforts in implementing a prevent and deter system for perpetrators of criminal acts of corruption from a fiqh siyasah dusturiyah perspective.

The method used by this research is Empirical Juridical research. The data collection techniques used in this research were observation, interviews and documentation at the Blitar City Immigration Office.

The results of this study indicate that: 1) Prevention is a restriction on an individual's ability to leave the territory of Indonesia, while Blocking is a restriction on foreign nationals from entering Indonesia. The implementation of prevention at the Blitar City Immigration office begins with a request from an institution, followed by the relevant institution creating a letter containing the identity and reason for the prevention to be sent to the Blitar City Immigration office. The Immigration office then evaluates the case's feasibility to be included in the blacklist, conducts verification, and finally enters the data into the Immigration and blacklist system. As for blocking, the process involves coordination with the police, including the use of the Interpol application to track criminal offenders. Subsequently, the issuance of a Red Notice is carried out to inform Interpol member countries about the wanted person. This system is supported by advanced biometric technology at airports, such as facial recognition, fingerprints, and iris scanning, which enables automatic detection when a perpetrator attempts to enter Indonesia. 2) The efforts of Blitar City Immigration in implementing the Prevention and Blocking system according to Law Number 6 of 2011 concerning Immigration begin with a request from the authorized official, followed by the creation of a written decision containing the full identity, photo, and the reason for the prevention or blocking. Afterward, verification is carried out

by the Minister of Immigration, with the possibility of rejection or acceptance, and the data is entered into the Immigration Management Information System. The prevention process is then carried out by immigration officers, with a 6-month prevention period that can be extended for another 6 months. If two extensions expire without any updates, the prevention or blocking is considered completed. The prevention and blocking system applied is passive, meaning it cannot be carried out without a request from the authorized official in accordance with the provisions of the law. This system aligns with the principles of good governance, particularly the principles of legal certainty and justice. 3) The efforts of Blitar City Immigration in implementing the prevention and blocking system for corruption crimes based on the principles of Fiqh Siyasah Dusturiyah include adhering to the principle of justice, ensuring that every action and policy taken is non-discriminatory and based on fair laws. The principle of trust, the principle of deliberation, and the principle of public welfare. By applying these principles, Blitar City Immigration not only functions in monitoring the movement of people but also plays an active role in maintaining the integrity of the government and upholding social justice that protects the public interest.

تجريدي

ضد والمكافحة الوقاية نظام في الهجرة دور ٢٠١٢/٢٠١١/١٢، نوفيتاساري سنتا الثانية الدرجة الهجرة مكتب حالة دراسة (٢٠١١ لعام ٦ رقم قانون منظور من الفساد جرائم مرتكبي المشرف مع .تولونغاكونغ الله رحمة علي سيد علي نيجيري إسلام جامعة)،(بليتر في الميناء غير .ه.م .ي.ه.ش لادين، :الأكاديمي

الدستورية السياسة فقه الفساد، جريمة والمنع، الوقاية :الرئيسيه الكلمات

مرتكب كل يحاول ما غالبا حيث بليتر، مدينة في الفساد جرائم مرتكبي إلى البحث هذا يستند ولهذا .القانونية الإجراءات لتجنب خارجها أو المنطقة خارج سواء الفرار، فساد جرائم في تورط له القانونية العملية من الإفلات من الجناة يتمكن لا حتى وردع وقائي تدبير اتخاذ يلزم السبب، يلعب .بليتر مدينة في الهجرة مكتب هو هذا في دور لها التي الوكالات من واحدة .الجارية والمكافحة، المنع نظام مع الفرار، من الفاسدة الفاعلة الجهات منع في مهما دورا الهجرة مكتب مكتب دور تحليل إلى الدراسة هذه تهدف .الهجرة بشأن ٢٠١١ لسنة ٦ رقم القانون ينظمه الذي والمنع المنع نظام خلال من الفساد جرائم منع في بليتر بمدينة الهجرة

من والردع الوقاية نظام تنفيذ يتم كيف ١) :هي الدراسة هذه في أثرت التي المشكلات صياغة الوقاية نظام تطبيق في بليتر مدينة في الهجرة جهود تبذل كيف ٢) .بليتر مدينة في الهجرة قبل في الهجرة جهود هي ما ٣) ٢٠١١ لسنة ٦ رقم للقانون وفقا الفساد جرائم لمرتكبي والردع .الدوستية سياسة فقه منظور من الفساد جرائم لمرتكبي والردع الوقاية نظام تطبيق في بليتر مدينة البيانات جمع تقنيات كانت .التجريبي القانوني البحث هي البحث هذا في المستخدمة الطريقة .بليتر مدينة في الهجرة مكتب في والتوثيق والمقابلات الملاحظة هي البحث هذا في المستخدمة أن حين في إندونيسيا، إقليم مغادرة من لفرد تقييد هي الوقاية ١) :أن إلى تشير الدراسة هذه نتائج في الهجرة مكتب في الوقاية عملية تبدأ .إندونيسيا دخول من الأجانب للمواطنين تقييد هو الحظر وسبب الهوية على تحتوي رسالة المعنية الجهة إعداد تليها حكومية، جهة من بطلب بلتر مدينة الحالة جدوى بتقييم الهجرة دائرة تقوم ثم .بلتر مدينة في الهجرة مكتب إلى إرسالها ليتم الوقاية والقائمة الهجرة نظام في البيانات إدخال وأخيراً التحقق، وإجراء السوداء، القائمة إلى لإضافتها تطبيق استخدام ذلك في بما الشرطة، مع التنسيق تشمل العملية فإن للحظر، بالنسبة أما .السوداء الأعضاء الإنترنت دول لإبلاغ أحمر إشعار إصدار يتم ذلك، بعد .المجرمين لتتبع الإنترنت مثل المطارات، في المتقدمة البيومترية التكنولوجيا على النظام هذا يعتمد .المطلوب بالشخص يحاول عندما التلقائي الكشف يتيح مما القرصية، ومسح الأصابع، بصمات الوجه، على التعرف

والحظر الوقاية نظام تطبيق في بلتر مدينة في الهجرة مكتب جهود (٢). إندونيسيا دخول الجاني قرار إعداد يليه المعني، المسؤول من بطلب تبدأ الهجرة ٢٠١١ بشأن لسنة ٦ رقم للقانون وفقاً من التحقق إجراء يتم ذلك، بعد. الحظر أو الوقاية وسبب الصورة، الكاملة، الهوية يتضمن كتابي. الهجرة معلومات إدارة نظام في البيانات إدخال ويتم القبول، أو الرفض إمكانية مع الهجرة، وزير قبل يمكن أشهر ٦ مدتها وقاية فترة تطبيق مع الهجرة، موظفي قبل من ذلك بعد الوقاية عملية تنفيذ يتم أو الوقاية اعتبار يتم تحديث، أي دون مرتين التمديد فترة انتهت إذا. أخرى أشهر ٦ لمدة تمديد لها طلب دون تنفيذه يمكن لا أنه أي سلبي، نظام هو والحظر للوقاية المتبع النظام. انتهى قد الحظر وبخاصة الرشيدة، الحوكمة مبادئ مع النظام هذا يتماشى. القانون لأحكام وفقاً المعني المسؤول من الوقاية نظام تطبيق في بلتر مدينة في الهجرة مكتب جهود (٣). العدالة ومبدأ القانوني اليقين مبدأ العدالة، بمبدأ التمسك تشمل الدستوري السياسي الفقه مبادئ إلى استناداً الفساد لجرائم والحظر الثقة، مبدأ. العدالة القوانين على وتعتمد تمييزية غير اتخاذها يتم سياسة أو إجراء كل أن ضمان مع في الهجرة مكتب يعمل لا المبادئ، هذه تطبيق خلال من. العامة المصلحة ومبدأ المشاورة، مبدأ نزاهة على الحفاظ في نشاطاً دوراً أيضاً يلعب بل الأشخاص، حركة مراقبة في فقط بلتر مدينة العامة المصلحة تحمي التي الاجتماعية العدالة وتعزيز الحكومة.